

## ANALISIS PENGARUH RENCANA KEBIJAKAN REDENOMINASI RUPIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DI INDONESIA

Irfan Mustofa<sup>1</sup>, Fadilah Falah Syifa<sup>2</sup>, Neisyawidya<sup>3</sup>

<sup>1</sup>STKIP NU Kabupaten Tegal, Program Studi Pendidikan Ekonomi  
email: [irfan.mustofa81@gmail.com](mailto:irfan.mustofa81@gmail.com)

<sup>2</sup>STKIP NU Kabupaten Tegal, Program Studi Pendidikan Informatika  
email: [mrsfalahsvifa91@gmail.com](mailto:mrsfalahsvifa91@gmail.com)

<sup>3</sup>STKIP NU Kabupaten Tegal, Program Studi Pendidikan Ekonomi  
email: [neisyawida30@gmail.com](mailto:neisyawida30@gmail.com)

### Abstract

*The development of digital payment methods in Indonesia is accelerating rapidly alongside the increasing use of e-wallets, QRIS, marketplaces, and mobile banking in public transactions, making digital payment systems a fundamental element in supporting monetary policy, including the planned rupiah redenomination. Rupiah redenomination is a policy aimed at simplifying the nominal value of the currency without changing its real value or purchasing power, with the objective of improving efficiency and governance within the financial system. This article analyzes the impact of the planned rupiah redenomination policy on digital payment methods in Indonesia using a descriptive literature review approach by examining various relevant sources. The findings indicate that Indonesia's digital payment system is relatively ready to support the implementation of redenomination, although challenges remain in terms of technological adjustments, cybersecurity threats, and the potential for public confusion. In the long term, rupiah redenomination has the potential to enhance efficiency and transparency in Indonesia's digital payment system.*

**Keywords:** Rupiah redenomination, Digital payment methods, Cashless transactions.

### Abstrak

Perkembangan metode pembayaran digital di Indonesia sedang mengalami percepatan pesat seiring dengan peningkatan pemanfaatan *e-wallet*, QRIS, *marketplace*, dan *mobile banking* dalam aktivitas transaksi masyarakat. Situasi ini menjadikan metode pembayaran digital sebagai elemen dasar dalam mendukung kebijakan moneter, termasuk rencana untuk meredesain rupiah. Redenominasi rupiah adalah suatu kebijakan untuk menyederhanakan nilai nominal mata uang tanpa merubah nilai nyata atau daya belinya, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan dalam sistem keuangan. Artikel ini ditujukan untuk menganalisis dampak rencana kebijakan redenominasi rupiah terhadap metode pembayaran digital di Indonesia. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah kajian pustaka deskriptif dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Temuan kajian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia cukup siap untuk mendukung pelaksanaan redenominasi, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dalam penyesuaian teknologi, ancaman keamanan siber, serta kemungkinan kebingungan di kalangan masyarakat. Dalam jangka panjang, redenominasi rupiah berpotensi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.

Kata Kunci: Redenominasi rupiah, Metode pembayaran digital, Transaksi tanpa uang tunai.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem transaksi keuangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai kemajuan yang signifikan berkat inovasi teknologi (Iskandar, 2024), yang mengindikasikan bahwa digitalisasi mengambil peran kunci dalam perubahan sistem keuangan negara. Berdasarkan penjelasan Maulida (Maulida, 2025), sistem transaksi keuangan terdiri dari beberapa tahapan yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menuntaskan berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, sehingga setiap transaksi dapat dicatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan ekonomi.

Sejalan dengan perkembangan ini, sistem transaksi keuangan saat ini tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga mencakup transaksi non-tunai, seperti pemindahan dana antar bank, penggunaan kartu debit, serta dompet digital yang menggunakan teknologi elektronik (Maulida, 2025), mencerminkan pergeseran pola

transaksi masyarakat menuju cara yang lebih modern. Salah satu kemajuan penting dalam transaksi non-tunai adalah kemunculan sistem pembayaran digital. Sistem pembayaran digital adalah cara untuk melakukan transaksi keuangan yang menggunakan teknologi digital melalui perangkat seperti smartphone dan koneksi internet, dengan uang elektronik atau e-money sebagai metode pembayaran yang sah (Rasyid, 2024), yang menurut penulis membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Rasyid (2024), sistem ini memungkinkan pembayaran dilakukan secara elektronik tanpa perlu menggunakan uang tunai atau kartu fisik, sehingga transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien, serta menunjukkan kelebihan pembayaran digital dibandingkan sistem tradisional. Dari penjelasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pembayaran digital telah menjadi bagian krusial dalam sistem transaksi keuangan di Indonesia karena dipandang lebih praktis dan efisien untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bank Indonesia, tren sistem pembayaran elektronik di tanah air dapat dilihat dari naiknya jumlah transaksi pembayaran digital. Menurut data dari Irawati (Irawati, 2025), pada bulan Agustus 2025, tercatat bahwa jumlah transaksi digital mencapai 4,43 miliar dengan pertumbuhan tahunan mencapai 39,79 persen, serta lonjakan pemakaian QRIS hingga 145,07 persen. Frekuensi tinggi dari transaksi digital ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran elektronik telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, rencana kebijakan redenominasi rupiah dapat berpotensi mempengaruhi sistem pembayaran digital, terutama berkaitan dengan penyesuaian nilai nominal, pencatatan transaksi, dan teknologi pembayaran. Dengan demikian, pesatnya perkembangan sistem pembayaran digital menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pengaruh dari rencana redenominasi rupiah di Indonesia.

Redenominasi rupiah adalah sebuah langkah yang bertujuan untuk menyederhanakan nilai nominal uang dengan mengurangi sejumlah angka nol, tanpa mempengaruhi nilai riil atau daya beli uang tersebut (Nurhalimah, 2025). Ini bertujuan untuk mempermudah penggunaan nominal rupiah dalam transaksi sehari-hari. Secara sederhana, langkah ini dilakukan dengan menghapus tiga angka nol dari nominal rupiah, sehingga uang tunai sebesar Rp1.000 disesuaikan menjadi Rp1 dan Rp100.000 menjadi Rp100, tanpa mengubah nilai ekonominya (Nurhalimah, 2025). Ini menandakan bahwa redenominasi tidak merugikan masyarakat dalam aspek nilai. Seperti yang dijelaskan oleh Lestari (2024), pelaksanaan redenominasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan, menata sistem pembayaran agar lebih terorganisir, serta memperkuat citra rupiah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini merupakan langkah strategis dalam mendukung modernisasi sistem keuangan. Selain itu, kebijakan ini juga diyakini dapat mempermudah proses pencatatan akuntansi modern, khususnya bagi lembaga keuangan dan pelaku bisnis yang menangani transaksi dengan nilai besar, sehingga relevan dengan perkembangan sistem keuangan digital yang ada saat ini.

Dengan penghapusan tiga digit nol dari nilai rupiah, proses transaksi seperti pembayaran menjadi lebih praktis, sehingga pencatatan dan pengisian data dapat dilakukan dengan lebih efektif (Dimas, 2025). Ini sangat mendukung layanan pembayaran digital yang menangani jutaan transaksi setiap harinya, karena hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penginputan dan kesalahpahaman mengenai nilai. Dalam hal ini, cepatnya pertumbuhan pembayaran digital sangat berkaitan dengan kebijakan redenominasi rupiah, karena jika kebijakan tersebut dilaksanakan, sistem pembayaran digital harus menyesuaikan dengan cara menampilkan dan mencatat nilai transaksi. Tingginya tingkat adopsi pembayaran digital juga mampu membantu dalam mendukung transisi redenominasi, sehingga transaksi bisa berlangsung dengan lancar dan stabil serta lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Artikel ini ditujukan untuk menilai pengaruh rencana kebijakan redenominasi rupiah terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia, yang kini semakin menjadi perhatian dalam usaha menuju masyarakat tanpa uang tunai, di mana sebagian besar transaksi dilakukan secara digital (Utomo, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan redenominasi tidak hanya berhubungan dengan penyederhanaan nilai mata uang, tetapi juga terkait dengan seberapa siap sistem pembayaran digital di Indonesia. Dimas (2025) mengungkapkan bahwa ketika nilai rupiah mengalami perubahan, seluruh layanan pembayaran digital perlu mengubah sistem mereka agar pencatatan transaksi tetap akurat dan terhindar dari kesalahan teknis. Oleh karena itu, kesiapan sistem pembayaran digital menjadi sangat vital agar pelaksanaan redenominasi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas transaksi di masyarakat. Berdasarkan penjelasan ini, artikel ini disusun untuk mengeksplorasi kemungkinan dampak rencana kebijakan redenominasi rupiah terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia, terutama terkait dengan sistem, stabilitas transaksi, dan kesiapan pelaku industri keuangan digital. Fokus pembahasan ini adalah hubungan antara kesiapan sistem pembayaran digital dengan rencana kebijakan redenominasi serta pengaruhnya terhadap penggunaan e-wallet, QRIS, *marketplace*, dan *mobile banking*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kajian pustaka yang bersifat deskriptif. Proses dalam pendekatan ini meliputi pengumpulan, pembacaan, dan analisis 20 referensi tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta artikel ilmiah yang membahas redenominasi rupiah dan sistem pembayaran digital.

Mahanum (Mahanum, 2021) menyatakan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya mengenai suatu subjek tertentu. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami perkembangan teori, temuan, dan perspektif dari para pakar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang merupakan metode untuk menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan berdasarkan fakta (Salmaa, 2023). Sugiyono menambahkan bahwa penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran fenomena yang diteliti tanpa niatan untuk memberikan kesimpulan umum.

Dalam studi ini, data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Artinya, data tersebut tidak menjalani uji statistik, tetapi dijelaskan dan disusun berdasarkan hubungan antarvariabel yang terdapat dalam sumber literatur. Analisis diarahkan pada hubungan antara tingkat kesiapan sistem pembayaran digital dan rencana kebijakan redenominasi, serta dampaknya terhadap e-wallet, QRIS, *marketplace*, dan *mobile banking*. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang jelas mengenai potensi dampak redenominasi terhadap sistem pembayaran digital di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini tabel hasil literatur review yang membahas perkembangan sistem pembayaran digital, serta keterkaitannya dengan rencana kebijakan redenominasi rupiah di Indonesia.

**Tabel 1. 1**  
**Hasil Literatul Review**

NO	PENULIS	JUDUL ARTIKEL	DIMUAT DI	HASIL
1.	Nuralam (2013)	Kajian Dampak Implementasi Kebijakan Redenominasi Rupiah	Jurnal Kebijakan Publik	Temuan menunjukkan bahwa kesuksesan redenominasi bergantung pada kerjasama antara Bank Indonesia, sektor perbankan, dan penyedia jasa pembayaran digital, serta adanya dukungan melalui sosialisasi dan pendidikan publik yang efisien.
2.	Fadhilah, et al. (2021)	Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review	Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)	Artikel ini mengungkapkan bahwa bertambahnya pemakaian dompet digital mencerminkan kesiapan sistem pembayaran digital untuk mendukung kebijakan moneter seperti redenominasi rupiah.
3.	Yulistiyono, A., et al. (2021)	Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi	Google Books	Artikel ini menyatakan bahwa keberhasilan dalam redenominasi sangat bergantung pada kestabilan ekonomi dan sistem perbankan, seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan di Turki dan Brasil, serta kegagalan yang dialami Zimbabwe karena inflasi yang sangat tinggi.
4.	Annazah, N. S., et al. (2022)	Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Redenominasi	Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Nusantara	Temuan menunjukkan bahwa diskusi tentang redenominasi rupiah telah ada sejak tahun 2010 dan secara resmi diungkapkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari strategi kebijakan moneter.
5.	Iskandar (2024)	Perkembangan Tren	Web Page	Artikel ini mengungkapkan bahwa

NO	PENULIS	JUDUL ARTIKEL	DIMUAT DI	HASIL
		Sistem Pembayaran Digital di Indonesia	Phintraco.com	kemajuan e-wallet dan QRIS menunjukkan kesiapan sistem pembayaran digital dalam memfasilitasi redenominasi rupiah.
6.	Rasyid (2024)	Pengertian Sistem Pembayaran Digital dan Beragam Jenisnya	Web Page Bayarind.id	Temuan menunjukkan bahwa metode pembayaran digital, seperti dompet elektronik, QRIS, dan perbankan mobile, memungkinkan transaksi tanpa uang tunai yang cepat dan efektif, sehingga memperkuat persiapan sistem untuk menghadapi kebijakan redenominasi.
7.	Maulida (2025)	Sistem Transaksi di Indonesia dan Ragam Sistem Pencatatannya	Web Page OnlinePajak	Temuan menunjukkan bahwa metode transaksi digital dianggap lebih efektif dan mempermudah penyesuaian angka, sehingga sangat berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan redenominasi.
8.	Febriari (2025)	BI: Transaksi Digital Juli 2025 Tumbuh 45%	Web Page MetroTV	Artikel ini mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan signifikan dalam transaksi pembayaran digital di Indonesia pada bulan Juli 2025, yang didorong oleh layanan mobile, internet, serta BI-Fast dan BI-RTGS.
9.	Irawati (2025)	Transaksi Pembayaran Digital Tumbuh 39,79 Persen pada Agustus 2025	Web Page InfoBankNews.com	Artikel ini mengungkapkan bahwa pembayaran digital, seperti transaksi QRIS, menunjukkan peningkatan yang besar.
10.	Bachmid (2025)	Opini-Redenominasi: Antara Nilai, Persepsi, dan Stabilitas Ekonomi	Web Page UIN Datokarama	Artikel ini mengungkapkan bahwa suksesnya redenominasi berkaitan erat dengan kestabilan ekonomi serta pemahaman warga tentang kebijakan itu.
11.	Nurhalimah (2025)	Mari Mengenal Apa Itu Redenominasi Rupiah dan Bagaimana Risiko yang Ditimbulkannya	Web Page Majalah Elektronik Kabupaten Tasikmalaya	Artikel ini mengungkapkan bahwa redenominasi rupiah ditujukan untuk mempermudah angka uang guna meningkatkan efisiensi transaksi serta memperbaiki citra mata uang.
12.	Ulum (2025)	Purbaya Siapkan RUU Dorong Redenominasi Rupiah untuk Efisiensi dan Kredibilitas Ekonomi	Web Page STIE STEKOM	Artikel ini menyebutkan bahwa rancangan undang-undang redenominasi dirancang untuk memperbaiki efisiensi dalam transaksi serta meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah dengan cara menyesuaikan sistem keuangan dan cara transaksi digital.

NO	PENULIS	JUDUL ARTIKEL	DIMUAT DI	HASIL
13.	Purwaningtyas (2025)	Sejarah Rupiah Pasca-Kemerdekaan hingga Wacana Redenominasi di Indonesia	Web Page NetralNews.com	Artikel ini menjelaskan bahwa redenominasi membutuhkan kestabilan ekonomi dan persiapan sistem pembayaran digital, serta harus dilaksanakan melalui proses yang panjang dan terstruktur.
14.	Arif (2025)	Redenominasi Rupiah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Indonesia	Web Page CNBC Indonesia	Artikel ini menjelaskan bahwa redenominasi diyakini mampu memperbaiki efisiensi transaksi serta memperkuat kepercayaan terhadap rupiah.
15.	Dimas (2025)	Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Transaksi Digital dan Ekonomi Indonesia	Web Page Bantengate.id	Artikel ini menemukan bahwa redenominasi memerlukan perubahan pada sistem digital, termasuk cara nilai ditampilkan, batasan transaksi, dan pemindahan data, untuk menghindari kesalahan dalam jumlah saat bertransaksi secara digital.
16.	Utomo (2025)	Dampak Redenominasi Rupiah bagi Dunia Teknologi dan Developer	Web Page Logique.co.id	Artikel ini menguraikan bahwa redenominasi memerlukan penyesuaian pada sistem digital, seperti tampilan nilai, batasan transaksi, serta pemindahan data, untuk menghindari kesalahan nominal dalam transaksi digital.
17.	Pramudita (2025)	Dampak Harmonisasi Rupiah terhadap Teknologi di Indonesia	Web Page BATS News	Artikel ini menunjukkan bahwa masalah dalam menyelaraskan rupiah mencakup persiapan teknologi, biaya sistem, dan kemungkinan kesalahan saat pelaksanaan.
18.	Jihan, dkk. (2026)	Implementasi Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	ResearchGate	Artikel ini mengidentifikasi melalui kajian sistematis bahwa efektivitas QRIS dalam pelayanan publik masih perlu didukung peningkatan kesadaran keamanan transaksi serta pemerataan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah terpencil.
19.	Widjiantoro, dkk. (2026)	Analisis Konseptual melalui Bibliometric-Systematic Literature Review: Keberhasilan Redenominasi Rupiah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	Jurnal Jesya	Hasil kajian bibliometrik terhadap 27 artikel Scopus menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi rupiah bergantung pada kesiapan analitik-legislatif, sosialisasi tersegmentasi untuk mencegah money illusion, kesiapan ekosistem bisnis, serta manajemen biaya transisi.

NO	PENULIS	JUDUL ARTIKEL	DIMUAT DI	HASIL
20.	Deny (2026)	QRIS Tumbuh Nyaris 100% di Mei 2026, Transaksi Digital Makin Mendominasi	Merdeka.com	Artikel ini melaporkan data Bank Indonesia bahwa volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar pada Mei 2026 dengan transaksi QRIS melonjak 95,10 persen, menunjukkan akselerasi kesiapan ekosistem digital menjelang rencana redenominasi.

Berdasarkan tabel yang dihasilkan dari tinjauan literatur, terlihat bahwa penelitian dan artikel yang dianalisis memiliki hubungan yang erat dengan inti fokus penelitian ini, terutama terkait dengan kemajuan sistem pembayaran digital, rencana kebijakan redenominasi rupiah, serta kemungkinan dampak dan risikonya terhadap sistem pembayaran digital. Sumber-sumber tersebut menjadi landasan bagi penulis dalam mengeksplorasi dampak rencana redenominasi pada pembayaran digital di Indonesia.

### 1. Perkembangan dan Kesiapan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia

Cara masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi finansial telah berubah dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan ini dipicu oleh kemajuan dalam teknologi informasi yang semakin mudah dijangkau, terutama melalui internet dan penggunaan smartphone yang hampir dimiliki oleh semua kalangan. Menurut Iskandar (2024), situasi ini mendorong warga untuk berpindah ke sistem pembayaran digital karena dianggap lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan dengan transaksi menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran digital memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang tunai, sehingga lebih cocok dengan kebutuhan aktivitas ekonomi zaman sekarang. Sebagai hasilnya, transaksi tanpa uang tunai semakin populer dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat.

Seiring dengan perubahan cara masyarakat dalam bertransaksi yang semakin mengarah ke pemanfaatan teknologi digital, sistem pembayaran digital menjadi elemen yang sangat penting dalam transaksi keuangan. Sistem ini berfungsi sebagai media untuk mentransfer nilai uang secara elektronik. Dalam implementasinya, pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai sistem pencatatan dan penyelesaian transaksi yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Ciri-ciri ini memungkinkan transaksi berlangsung dengan lebih cepat, tepat, dan mudah untuk dilacak, sehingga mendukung efisiensi serta keteraturan dalam aktivitas ekonomi (Maulida, 2025). Situasi ini membuat sistem pembayaran digital semakin superior jika dibandingkan dengan transaksi tradisional yang masih bergantung pada uang tunai.

Seiring dengan hal itu, sistem pembayaran digital menggunakan berbagai alat teknologi seperti komputer, ponsel cerdas, dan koneksi internet. Alat yang dimanfaatkan meliputi uang digital, pembayaran dengan kode QR, dan perbankan seluler yang sekarang semakin diterima sebagai sarana transaksi yang valid dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Adanya alat-alat tersebut menjadikan proses transaksi lebih mudah dan fleksibel, karena dapat dilakukan kapan saja tanpa harus mengandalkan uang tunai atau kartu kredit. Kemudahan ini menjadi salah satu alasan utama bertambahnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia.

Perkembangan sistem pembayaran secara digital dapat diamati melalui peningkatan jumlah transaksi di tanah air. Merujuk data dari Febriari (Febriari, 2025), Bank Indonesia melaporkan bahwa transaksi pembayaran digital telah mencapai 4,44 miliar dengan pertumbuhan tahunan sebesar 45,30 persen. Kenaikan ini sebagian besar didorong oleh penggunaan aplikasi mobile dan internet yang menjadi saluran utama bagi transaksi tanpa uang tunai. Banyaknya transaksi ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital kini bukan hanya tambahan, tetapi sudah menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Pertumbuhan transaksi digital juga didorong oleh semakin banyaknya pengguna dan pedagang yang menggunakan sistem pembayaran tanpa uang tunai. Transaksi yang dilakukan melalui aplikasi seluler meningkat 26,07 persen setiap tahun, sementara transaksi di internet bertambah 12,68 persen (Febriari, 2025). Situasi ini menggambarkan pergeseran kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan transaksi secara digital, baik untuk kebutuhan sehari-hari, layanan transportasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, pembayaran secara digital tidak lagi dianggap sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi metode utama untuk melakukan transaksi.

Dari segi infrastruktur, kemajuan sistem pembayaran digital di Indonesia semakin menunjukkan kemajuan yang nyata. Menurut informasi yang direkam oleh Febriari (2025), sistem BI-FAST telah mencatat jumlah transaksi ritel mencapai 414,62 juta dengan total nilai Rp1. 016,48 triliun dan pertumbuhan tahunan sebesar 37,56 persen. Untuk transaksi bernilai tinggi, BI-RTGS juga menunjukkan hasil yang baik dengan memproses 959,32 ribu transaksi yang bernilai Rp19. 791,94 triliun. Selain itu, merujuk pada Irawati (Irawati, 2025), penggunaan QRIS mengalami lonjakan signifikan hingga 145,07 persen setiap tahunnya, yang menggambarkan semakin meluasnya adopsi pembayaran digital di berbagai sektor ekonomi. Data ini memperlihatkan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia tumbuh secara keseluruhan, baik untuk transaksi kecil maupun besar.

Selain didorong oleh kemajuan teknologi dan infrastruktur, aspek sosial juga memainkan peranan penting dalam mempercepat penerimaan pembayaran digital di Indonesia. Salah satu momen penting adalah masa pandemi Covid-19 yang mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan beralih ke transaksi tanpa uang tunai. Mengacu pada Fadhilah et al. (Fadhilah, Layyinna, Khatami, & Fitroh, 2021), pemerintah juga memperluas pemakaian dompet digital melalui distribusi dana Program Kartu Prakerja, sehingga masyarakat lebih terbiasa melakukan pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Kebiasaan ini kemudian berlanjut setelah pandemi dan memperkuat posisi sistem pembayaran digital sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia tidak hanya meningkat dalam hal jumlah transaksi, tetapi juga telah menunjukkan tingkat kesiapan yang cukup baik. Kesiapan ini terlihat dari infrastruktur pembayaran yang semakin terhubung dan mudah beradaptasi dengan perubahan kebijakan moneter, seperti yang dijelaskan oleh Bachmid (Bachmid, 2025). Dengan dukungan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi, penyesuaian kebijakan moneter bisa dilakukan dengan lebih efisien. Misalnya, penyesuaian nilai mata uang dianggap lebih mudah diimplementasikan melalui sistem pembayaran digital karena prosesnya telah terotomatisasi dan terkelola secara sistematis.

Secara keseluruhan, kemajuan dan kesiapan sistem pembayaran digital di Indonesia didukung oleh tingginya tingkat penerimaan dari masyarakat, penguatan infrastruktur, serta pergeseran pola transaksi menuju non-tunai. Situasi ini menjadi dasar penting dalam mendukung kebijakan moneter di masa depan, termasuk rencana untuk redenominasi rupiah. Dengan sistem pembayaran digital yang semakin berkembang, proses penyesuaian nilai mata uang berpotensi dilakukan dengan lebih teratur, efisien, dan dengan risiko kesalahan transaksi yang lebih minim.

## **2. Rencana Kebijakan Redenominasi Rupiah di Indonesia**

Redenominasi merupakan langkah untuk menyederhanakan angka nominal uang tanpa mengubah nilai tukar dan daya beli. Dalam hal rupiah, Nurhalimah (2025) mengungkapkan bahwa langkah ini diambil dengan menghapus sejumlah angka nol di belakang nominal agar lebih praktis dan mudah dipahami dalam transaksi dan pencatatan keuangan. Contohnya, uang Rp1. 000 disederhanakan menjadi Rp1 dan uang Rp100. 000 menjadi Rp100 tanpa mengurangi nilai ekonominya. Dengan demikian, redenominasi bersifat administratif dan tidak mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Kebijakan redenominasi dibuat untuk meningkatkan efektivitas ekonomi dan memperbaiki pengelolaan sistem keuangan di Indonesia. Ulum (Ulum, 2025) mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menekankan pentingnya redenominasi guna menyederhanakan transaksi serta pelaporan keuangan, memperkuat kepercayaan terhadap rupiah, dan mempertahankan stabilitas daya beli masyarakat. Selain itu, pengurangan nilai nominal mata uang dianggap dapat mempermudah perbandingan sejumlah indikator ekonomi Indonesia dengan negara lain yang sudah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang serupa. Diskusi mengenai redenominasi rupiah sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat Gubernur Bank Indonesia waktu itu, Darmin Nasution, mengusulkan rencana tersebut sebagai bagian dari langkah reformasi sistem moneter (Annazah, Juanda, & Mulatsih, 2022). Kemudian, rencana ini diperkuat kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029, yang menetapkan target penyelesaian rancangan undang-undang redenominasi pada tahun 2027.

Wacana mengenai redenominasi rupiah sudah lama menjadi pembicaraan pemerintah dan kembali muncul seiring dengan penilaian stabilitas ekonomi. Purwaningtyas (Purwaningtyas, 2025) menyatakan bahwa Bank Indonesia menegaskan bahwa redenominasi adalah kebijakan jangka panjang yang harus dilalui dengan berbagai tahap sosialisasi, masa transisi dari uang lama ke uang baru, hingga penerapan penuh mata uang rupiah dalam nominal baru tanpa mengurangi kemampuan beli masyarakat. Pelaksanaan kebijakan ini hanya mungkin

dilakukan jika terdapat dukungan stabilitas ekonomi, inflasi yang terjaga, dan kesiapan pada sistem pembayaran. Memasuki tahun 2025, urgensi untuk menyederhanakan nominal rupiah menjadi semakin penting sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, walaupun pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan tidak dilakukan dengan terburu-buru.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan dalam kebijakan redenominasi sangat tergantung pada kondisi ekonomi yang mendasarinya. Yulistiyono et al. (Yulistiyono et al., 2021) mengemukakan bahwa negara seperti Turki dan Brasil berhasil melaksanakan redenominasi karena adanya stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi yang efektif. Sebaliknya, Zimbabwe gagal dalam redenominasi karena inflasi yang sangat tinggi dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional. Pengalaman ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa kebijakan redenominasi harus dirancang dengan cermat, dilakukan secara bertahap, dan didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil.

Sejalan dengan pembelajaran dari pengalaman negara lain tersebut, pentingnya kebijakan redenominasi di Indonesia semakin kuat dalam konteks masyarakat tanpa uang tunai. Arif (Arif, 2025) mengungkapkan bahwa redenominasi dapat meningkatkan efisiensi transaksi digital serta mempercepat proses pencatatan keuangan. Penyederhanaan nilai mata uang juga berpotensi untuk mengurangi kerumitan angka dalam sistem pembayaran modern yang berbasis pada teknologi. Ini menunjukkan bahwa redenominasi tidak hanya berkaitan dengan penyederhanaan mata uang, tetapi juga memiliki potensi untuk memperkuat sistem pembayaran digital yang kini semakin mendominasi aktivitas transaksi masyarakat.

### **3. Dampak Rencana Kebijakan Redenominasi Rupiah terhadap Sistem Pembayaran Digital**

Perkembangan dunia digital telah mengubah secara signifikan cara orang melakukan transaksi keuangan di Indonesia. Dengan adanya peningkatan penggunaan internet dan telepon pintar, sistem pembayaran digital semakin banyak digunakan untuk transaksi nontunai karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat (Iskandar, 2024). Kini, aktivitas ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sistem pembayaran digital, sehingga pergeseran dari transaksi konvensional menjadi lebih jelas terlihat.

Selain itu, sejalan dengan cepatnya perkembangan digital dalam sektor keuangan, muncul berbagai alat pembayaran digital seperti QRIS, transfer instan, dompet elektronik, platform jual beli, dan perbankan mobile yang turut memengaruhi dinamika sistem keuangan di Indonesia. Purwaningtyas (2025) menyatakan bahwa transaksi secara digital dapat mengurangi penggunaan uang fisik, meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi, dan membuat rupiah menjadi lebih responsif terhadap kemajuan teknologi finansial. Dalam situasi ini, rencana redenominasi rupiah akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan transaksi digital, karena semua nilai, tampilan angka, dan sistem pembayaran perlu disesuaikan dengan format angka yang baru.

Salah satu dampak yang paling jelas dari pelaksanaan redenominasi adalah pada kegiatan transaksi sehari-hari masyarakat. Dimas (Dimas, 2025) menyatakan bahwa seluruh sistem pembayaran digital, termasuk e-wallet, QRIS, pasar online, serta layanan perbankan seluler, akan menampilkan angka baru yang telah disesuaikan berdasarkan kebijakan redenominasi. Misalnya, harga Rp50.000 akan bertransformasi menjadi Rp50 setelah redenominasi, meskipun nilai dan daya belinya tetap tidak berubah. Perubahan dalam tampilan angka ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap harga, karena angka yang lebih kecil biasanya terlihat lebih terjangkau. Keadaan ini menunjukkan bahwa redenominasi tidak hanya berfungsi untuk menyederhanakan nilai mata uang, tetapi juga dapat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat dari segi psikologis.

Pada layanan dompet digital, redenominasi mempengaruhi penyesuaian saldo pengguna, jumlah pengisian ulang, cashback, serta batasan transaksi minimum dan maksimum. Semua sistem perlu dikalibrasi kembali agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengguna saat melihat perubahan angka saldo. Sementara itu, dalam sistem QRIS, redenominasi membutuhkan sinkronisasi antara penyedia layanan pembayaran, bank, dan pedagang. Pelaku bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus menyesuaikan sistem pencatatan transaksi dan laporan keuangan agar tetap akurat dan konsisten dengan jumlah baru. Di sisi lain, penyederhanaan angka justru dapat mempermudah proses memasukkan harga dan mengurangi kesalahan penulisan jumlah dalam transaksi QRIS.

Dampak dari redenominasi juga dirasakan oleh pasar dan platform perdagangan online. Semua harga barang, biaya pengiriman, promosi potongan harga, serta sistem pembayaran digital harus diubah ke nilai yang baru. Pasar perlu memastikan bahwa sistem penghitungan harga, algoritma diskon, dan pembayaran berfungsi dengan tepat agar tidak merugikan baik penjual maupun pembeli. Di samping itu, harga yang terlihat lebih

rendah dalam angka dapat meningkatkan ketertarikan belanja masyarakat, meskipun nilai sesungguhnya tetap tidak berubah, sehingga dapat memengaruhi pola konsumsi di platform digital.

Dari perspektif perbankan, layanan perbankan seluler memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan redenominasi rupiah. Semua fungsi transaksi, termasuk pengiriman uang, pelunasan tagihan, simpanan, dan catatan transaksi, perlu disesuaikan dengan sistem angka yang baru. Perbankan seluler juga berfungsi sebagai media utama dalam menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai redenominasi, sehingga dapat membantu menekan kesalahan pada transaksi dan memperluas pemahaman masyarakat tentang perubahan nilai nominal rupiah.

Dari aspek teknologi, penerapan redenominasi memerlukan penyesuaian yang signifikan pada sistem digital yang mendukung aktivitas transaksi. Utomo (Utomo, 2025) menyatakan bahwa aplikasi keuangan, platform *e-commerce*, serta sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) harus melakukan migrasi data transaksi agar saldo, harga, dan riwayat transaksi tetap sejalan dengan angka baru. Di samping itu, penyesuaian terhadap tampilan aplikasi, format penulisan mata uang, batas transaksi, dan mekanisme validasi input angka menjadi langkah krusial untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam sistem pembayaran digital.

Selain itu, redenominasi juga membawa manfaat positif untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem digital. Penyederhanaan nilai nominal dapat mempercepat pemrosesan transaksi, mengurangi kebutuhan penyimpanan data, dan memudahkan pencatatan akuntansi digital (Utomo, 2025). Jika diterapkan dengan benar, redenominasi rupiah tidak hanya mempermudah transaksi dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran digital, tetapi juga dapat memperkuat pemahaman keuangan masyarakat serta mempersiapkan sistem digital menghadapi perubahan teknologi keuangan di Indonesia.

#### **4. Tantangan dan Implikasi Rencana Kebijakan Redenominasi Rupiah terhadap Sistem Pembayaran Digital**

Meskipun redenominasi rupiah dapat menawarkan keuntungan dalam menyederhanakan sistem pembayaran digital, pelaksanaannya mengalami berbagai kendala, terutama saat masa transisi. Salah satu masalah utama berkaitan dengan kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pembayaran digital. Pramudita (Pramudita, 2025) menyatakan bahwa penyesuaian format mata uang memerlukan perubahan menyeluruh pada sistem inti lembaga keuangan dan platform digital, termasuk sistem lama yang masih dipakai oleh sejumlah bank dan perusahaan besar. Sistem teknologi yang sudah ketinggalan zaman biasanya sulit untuk diperbarui, berpotensi menyebabkan ketidakcocokan data, serta menghabiskan biaya dan waktu yang cukup signifikan selama proses migrasi.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan redenominasi berkaitan dengan pemindahan sistem lama yang masih digunakan oleh berbagai lembaga keuangan. Pramudita (2025) menyatakan bahwa sejumlah bank besar dan perusahaan yang sudah lama beroperasi masih bergantung pada sistem inti yang berbasis teknologi kuno, seperti COBOL atau mainframe. COBOL adalah bahasa pemrograman usang yang dirancang untuk pengelolaan data bisnis serta transaksi keuangan berskala besar, tetapi memiliki batasan dalam hal fleksibilitas dan penyatuan dengan sistem digital yang lebih modern. Mengubah format mata uang dalam sistem tersebut membutuhkan proses yang rumit, bisa mengganggu konsistensi dan integritas data, serta memerlukan biaya dan waktu yang signifikan. Situasi ini berisiko menghambat proses transisi redenominasi, terutama dalam layanan pembayaran digital yang terhubung langsung dengan sistem perbankan.

Selain masalah teknis, proses pemindahan dan pembaruan sistem juga dapat meningkatkan kemungkinan munculnya kerentanan di bidang keamanan siber. Selama periode transisi, kemungkinan munculnya celah keamanan dapat terjadi akibat perubahan sistem dan pembaruan basis data yang besar. Keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber melalui tindakan penipuan online, serangan phishing, dan penyalahgunaan informasi transaksi, terutama dengan memanfaatkan kebingungan yang dialami pengguna selama masa penyesuaian (Pramudita, 2025). Oleh karena itu, penguatan keamanan digital menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan redenominasi. Tantangan berikutnya dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan platform perdagangan. Pramudita (2025) mengungkapkan bahwa UMKM cenderung memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi teknis maupun finansial, untuk melakukan penyesuaian sistem secara mandiri. Sejumlah pelaku usaha masih menggunakan alat kasir atau sistem pencatatan lama yang tidak lagi mendapatkan pembaruan dari penyedia layanan. Tanpa adanya dukungan teknis, edukasi, dan insentif yang cukup, UMKM berisiko tertinggal dalam proses transformasi sistem pembayaran digital akibat penerapan redenominasi.

Di luar aspek teknis, tantangan yang juga penting adalah pendidikan masyarakat. Ketidapahaman publik tentang istilah redenominasi bisa menyebabkan kebingungan, terutama anggapan bahwa redenominasi sama dengan pengurangan nilai. Sebenarnya, pengurangan nilai terjadi ketika inflasi sangat tinggi dan kondisi ekonomi memburuk, sedangkan redenominasi dilakukan ketika inflasi rendah dan perekonomian cukup stabil (Nuralam, 2013). Dalam konteks sistem pembayaran digital, kesalahpahaman ini dapat membuat kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah dan metode transaksi digital menurun.

Selain itu, redenominasi juga berpengaruh secara psikologis terhadap masyarakat dan pelaku bisnis. Masyarakat yang telah terbiasa dengan angka besar dalam rupiah mungkin merasa kehilangan nilai secara psikologis saat angka-angka tersebut disederhanakan, walaupun daya beli tidak berubah. Bagi pelaku bisnis, perubahan angka dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap harga dan nilai produk yang sebelumnya ditampilkan dengan banyak angka nol. Efek psikologis ini menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kesiapan mental dan pemahaman masyarakat.

Dari sisi implikasi, penerapan redenominasi dalam jangka pendek berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat akibat perubahan tampilan nominal yang lebih kecil pada berbagai platform pembayaran digital. Kondisi ini dapat memicu kesalahan persepsi harga, gangguan teknis pada sistem yang belum sepenuhnya menyesuaikan, serta meningkatnya risiko kesalahan input nominal dalam transaksi digital. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan redenominasi justru dapat memberikan dampak positif bagi sistem pembayaran digital. Penyederhanaan nominal mata uang dinilai mampu meningkatkan efisiensi sistem digital, mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memperkuat integrasi antar-sistem pembayaran. Selain itu, struktur nominal yang lebih sederhana juga berpotensi mendukung stabilitas dan transparansi transaksi digital, sehingga memudahkan pengawasan dan pengelolaan sistem pembayaran di Indonesia.

Dalam hal ini, tugas pemerintah dan Bank Indonesia sangat penting untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan redenominasi. Nuralam (2013) menekankan bahwa Bank Indonesia harus menjalin hubungan yang solid dengan pihak perbankan, penyedia layanan pembayaran elektronik, serta pemerintah daerah dalam proses penyuluhan dan penerapan kebijakan. Edukasi masyarakat juga perlu dilakukan secara luas dan terus-menerus melalui berbagai saluran digital, seperti perbankan seluler, dompet digital, media sosial, dan layanan pesan singkat, sehingga pemahaman masyarakat dapat merata hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Dengan adanya dukungan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang terstruktur, berbagai kesulitan dalam redenominasi dapat dikurangi, serta manfaat jangka panjang untuk sistem pembayaran digital dapat dimaksimalkan.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa rencana kebijakan redenominasi rupiah berdampak besar pada sistem pembayaran digital di Indonesia. Sistem pembayaran digital yang terus maju, termasuk e-wallet, QRIS, *marketplace*, dan *mobile banking*, berperan krusial dalam mendukung pelaksanaan redenominasi karena seluruh proses transaksi dan pencatatan keuangan sangat bergantung pada teknologi digital.

Pengaruh kebijakan redenominasi rupiah terhadap sistem pembayaran digital terlihat melalui kebutuhan untuk menyesuaikan angka dalam teknologi, tampilan transaksi, serta pengelolaan data keuangan. Dalam waktu dekat, kebijakan ini dapat menimbulkan sejumlah tantangan, seperti penyesuaian sistem, risiko keamanan siber, keterbatasan dalam adaptasi bagi UMKM, dan kebingungan masyarakat terhadap perubahan angka. Namun, dalam jangka panjang, redenominasi bisa memberikan efek positif seperti peningkatan efisiensi transaksi, kemudahan dalam pencatatan keuangan, dan penguatan transparansi dalam sistem pembayaran digital.

#### **Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih bersifat deskriptif dan didasarkan pada kajian pustaka, sehingga belum mengukur secara empiris tingkat kesiapan sistem pembayaran digital terhadap rencana redenominasi rupiah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-method, misalnya melalui survei kepada pengguna e-wallet, QRIS, dan mobile banking, guna mengukur tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat secara lebih terukur. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji secara lebih mendalam aspek kesiapan teknis penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) dalam menghadapi migrasi sistem inti, termasuk estimasi biaya dan waktu transisi yang dibutuhkan. Selain itu, mengingat RUU Redenominasi ditargetkan rampung pada periode 2026–2027, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbarui kajian secara berkala mengikuti perkembangan regulasi serta membandingkan kesiapan sistem pembayaran digital Indonesia dengan negara lain yang telah berhasil melaksanakan redenominasi, seperti Turki, sebagai pembelajaran praktik terbaik (*best practice*). Kajian mengenai mitigasi risiko keamanan siber selama periode

transisi serta strategi edukasi publik yang efektif, khususnya bagi UMKM dan masyarakat di wilayah terpencil, juga menjadi area yang penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan redenominasi rupiah sangat ditentukan oleh sejauh mana kesiapan sistem pembayaran digital dan keterlibatan aktif pemerintah serta Bank Indonesia dalam pengawasan, koordinasi, dan edukasi kepada publik. Jika semua proses ini dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, redenominasi rupiah bisa memperkuat sistem pembayaran digital dan mendorong kemodernan sistem keuangan di Indonesia.

## E. DAFTAR RUJUKAN

- Annazah, N. S., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Redenominasi. *Jurnal Ekonomi, Akutansi Dan Manajemen Nusantara*, 1(1), 61–73.
- Arif, M. N. R. Al. (2025). *Redenominasi Rupiah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251110124219-14-683810/redenominasi-rupiah-dan-dampaknya-terhadap-pembangunan-indonesia>
- Bachmid, S. (2025). *Opini-Redenominasi: Antara Nilai, Persepsi, dan Stabilitas Ekonomi*. UIN Datokarama. <https://uindatokarama.ac.id/opini-redenominasi-antara-nilai-persepsi-dan-stabilitas-ekonomi/>
- Dimas. (2025). *Dampak Redenominasi Rupiah terhadap Transaksi Digital dan Ekonomi Indonesia / BANTENGATE*. BantenGate.Id. <https://www.bantengate.id/dampak-redenominasi-rupiah-terhadap-transaksi-digital-dan-ekonomi-indonesia/>
- Deny, S. (2026). *QRIS Tumbuh Nyaris 100% di Mei 2026, Transaksi Digital Makin Mendominasi*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/qrisk-tumbuh-nyaris-100-di-mei-2026-transaksi-digital-makin-mendominasi-584298-mvk.html>
- Fadhilah, J., Layyinna, C. A. A., Khatami, R., & Fitroh. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Wallet Sebagai Solusi Alternatif Pembayaran Modern: Literature Review. *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 2(2), 89–97. <https://doi.org/10.36596/jcse.v2i2.219>
- Febriari, S. (2025). *BI: Transaksi Digital Juli 2025 Tumbuh 45%*. MetroTV. <https://www.metrotvnews.com/play/KdZCjX46-bi-transaksi-digital-juli-2025-tumbuh-45>
- Irawati. (2025). *Transaksi Pembayaran Digital Tumbuh 39,79 Persen pada Agustus 2025*. Infobankberita. <https://infobanknews.com/transaksi-pembayaran-digital-tumbuh-3979-persen-pada-agustus-2025/>
- Iskandar, M. I. (2024). *Perkembangan Tren Sistem Pembayaran Digital di Indonesia - Phintraco Group*. Phintraco Group. <https://phintraco.com/tren-sistem-pembayaran-digital/>
- Jihan, A., Ariski, M. R., Fahrezi, D. A., & Bahtiar, M. Y. (2026). *Implementasi Sistem Pembayaran Digital QRIS dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. ResearchGate. [https://www.researchgate.net/publication/403686317\\_Implementasi\\_Sistem\\_Pembayaran\\_Digital\\_QRIS\\_dalam\\_Meningkatkan\\_Pelayanan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/403686317_Implementasi_Sistem_Pembayaran_Digital_QRIS_dalam_Meningkatkan_Pelayanan_Publik)
- Lestari, A. D. (2024). Pengaruh Redenominasi Mata Uang Rupiah Terhadap Minat Belanja Gen Z. In *Politeknik Negeri Jakarta*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Maulida, R. (2025). *Sistem Transaksi di Indonesia dan Ragam Sistem Pencatatannya - OnlinePajak*. OnlinePajak.Com. <https://www.online-pajak.com/uncategorized-id/sistem-transaksi-di-indonesia-dan-ragam-sistem-pencatatannya/>
- Nuralam. (2013). Kajian Dampak Implementasi Kebijakan Redenominasi Rupiah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(1), 39–44.
- Nurhalimah. (2025). Mari Mengenal Apa Itu Dedenominasi Rupiah dan Bagaimanan Risiko yang Ditimbulkannya. *Majalah Elektronik Kabupaten Tasikmalaya*. <https://emagz.tasikmalayakab.go.id/mari-mengenal-apa-itu-redenominasi-rupiah-dan-bagaimana-risiko-yang-ditimbulkannya/>
- Pramudita, B. (2025). *Dampak Harmonisasi Rupiah terhadap Teknologi di Indonesia*. BATS News. <https://news.bats-consulting.com/articles/the-impact-of-rupiah-harmonization-on-technology-in-indonesia>
- Purwaningtyas, A. (2025). *Sejarah Rupiah Pasca-Kemerdekaan hingga Wacana Redenominasi di Indonesia*. Netralnews.com. <https://www.netralnews.com/sejarah-rupiah-pasca-kemerdekaan-hingga-wacana-redenominasi-di-indonesia/UIZ2MUVPaTJ6K3k4TW9HWkQ4ZnJXdz09>

- Rasyid, A. R. (2024). *Pengertian Sistem Pembayaran Digital dan Beragam Jenisnya - Bayarind.* Bayarind. <https://www.bayarind.id/news/pengertian-sistem-pembayaran-digital-dan-beragam-jenisnya/>
- Salmaa. (2023). *Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya.* DuniaDosen.Com. <https://duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>
- Ulum, W. (2025). *Purbaya Siapkan RUU Dorong Redenominasi Rupiah untuk Efisiensi dan Kredibilitas Ekonomi.* STIE STEKOM. <https://stiestekom.ac.id/berita/purbaya-siapkan-ruu-dorong-redenominasi-rupiah-untuk-efisiensi-dan-kredibilitas-ekonomi/2025-11-08>
- Utomo, A. H. D. (2025). *Dampak Redenominasi Rupiah bagi Dunia Teknologi dan Developer.* LOGIQUE's Blog. <https://www.logique.co.id/blog/2025/11/11/dampak-redenominasi-rupiah-bagi-developer/>
- Widjiantoro, S. T., Segati, A., & Yusrizal, Y. (2026). *Analisis Konseptual melalui Bibliometric-Systematic Literature Review: Keberhasilan Redenominasi Rupiah dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.* Jesya, 9(2), 689–709. <https://doi.org/10.36778/jesya.v9i2.2689>
- Yulistiyono, A., Gunawan, E., Widayati, T., Firmansyah, H., Malau, N. A., Megaster, T., Ekopriyono, A., Nurhayati, T. P. T., Siahaan, A. L. S., Suharno, S., Setiyawan, S., Sumarjiyanto, N., Manullang, S. O., Retnandari, S. D., Nawatmi, S., Caroline, C., Nusantara, A., Isnowati, S., Hikmah, H., & Indawati, N. (2021). Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi. In *Penerbit Insania*.